

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPBD mempunyai tugas membantu Bupati Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

Posisi BPBD sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana". Dari isu ketahanan bencana, BPBD terkait dengan sub isu: Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Penanggulangan Bencana

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sub Isu (Misi ke 8)	Indikator tujuan :	Indikator Program :
1	kapasitas daerah dalam penanganan bencana	rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	Belum terbentuknya desa tangguh bencana
		belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	belum optimalnya SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten (SOP, RPB, RAD mitigasi, Renkon, Ren operasi, perda PB, Perbup status darurat)
			belum optimalnya dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekontruksi
			kurangnya kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
			kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya BPBD mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Ketahanan bencana.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, BPBD mendukung pencapaian misi " Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan". Misi ini sangat terkait dengan mitigasi bencana

Berdasarkan identifikasi permasalahan penanggulangan bencana dihadapi BPBD sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel III.2.
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
 Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 8 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Masih rendahnya Kapasitas pemerintah dalam penanganan bencana	1. Kompetensi, profesionalisme, kehandalan dan kapasitas sumber daya penyelenggara n penanggulanga n bencana masih kurang 2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan penanggulanga n bencana 3. manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi 4. Jejaring pelibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha belum dikembangkan secara optimal	a. Banyaknya tawaran pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian terkait, perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional b. Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana melalui kementerian/lembaga teknis, pemanfaatan sumberdaya milik sektor swasta c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi d. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun badan usaha masih sangat terbuka

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi BPBD untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah

1. masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
2. masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
3. kurangnya fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana
4. belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia di bidang penanggulangan bencana
5. belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
6. belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

3.3. Telaahan renstra Kementerian

1. Telaah Renstra BNPB

Berdasarkan rancangan Renstra BNPB tahun 2015 – 2019 diketahui bahwa visi BNPB adalah sebagai berikut:

“Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu bagaimana negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana, serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi, mengadaptasi, serta menghindari/meminimalisir dampak bencana.

Berdasarkan agenda pembangunan (Nawa Cita) arah kebijakan umum dan strategi pembangunan nasional pengelolaan bencana 2015-2019, maka arah kebijakan umum penyelenggaraan pembangunan bencana sesuai dengan peran Badan Penanggulangan Bencana dalam koordinasi, komando dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan bencana diarahkan pada pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam setiap dimensi pembangunan
2. Penanggulangan bencana harus mengutamakan penyelamatan

sebanyak mungkin nyawa

3. Penanggulangan bencana harus diikuti dengan pemulihan kembali masyarakat menjadi lebih baik dan lebih aman dibanding sebelum bencana
4. Penyiapan sumberdaya yang memadai dalam rangka kesiapan untuk menghadapi bencana
5. Pembinaan dalam rangka membangun kemandirian penanggulangan bencana daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

2. Telaah Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

a. Visi

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

“Masyarakat Jawa Tengah Yang Tangguh Dalam Penanggulangan Bencana”

Masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana berarti masyarakat yang mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengenali ancaman bahaya, beradaptasi, serta mampu mengorganisasikan sumberdaya yang dimiliki untuk menghadapi potensi ancaman bencana, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas dalam mengurangi risiko bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan dan membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Mewujudkan pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana
2. Menjadikan BPBD Kabupaten Pati sebagai incider commander yang kuat dalam tanggap darurat bencana
3. Mengembangkan SDM berbasis kompetensi
4. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur penanggulangan bencana yang handal
5. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

6. Mewujudkan masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana di Kabupaten Pati
7. Mengembangkan system informasi pengelolaan data dan informasi bencana secara terpadu
8. Meningkatkan kemampuan dalam perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana.
9. Mengembangkan system peringatan dini berbasis masyarakat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan pelaksanaan/operasional dalam bentuk rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pati merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 meliputi : a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa; dan b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Rencana sistem perwilayahan pembangunan diwujudkan melalui : a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan b. rencana sistem pusat pelayanan. Pasal 12 (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan. (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedariaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan
- f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi :

Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 merencanakan sistem pusat pelayanan meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal , Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi BPBD adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran BPBD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Belum terintegrasikan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Pati
2. Belum memadainya dukungan anggaran BPBD kabupaten Pati
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Pati
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati
6. kurangnya fasilitasi pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Pati
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Pati
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kab. Pati
9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pati
10. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah